

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Hari : Selasa

Subyek : Lumpur Lapindo

Tanggal : 02 November 2010

Hal : 22

SIDOARJO

Gubernur Dorong Bupati Selesaikan Dampak Lumpur

SIDOARJO, KOMPAS - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Bupati Sidoarjo Saiful Ilah segera menuntaskan dampak persoalan semburan lumpur Lapindo. Dampak yang harus segera diselesaikan adalah relokasi jalan arteri yang menghubungkan Surabaya ke Malang dan Pasuruan. Langkah konsinyasi dipandang merupakan jalan keluar terbaik untuk membebaskan lahan relokasi.

Soekarwo mengatakan hal itu di sela-sela pelantikan Saiful Ilah sebagai Bupati Sidoarjo periode 2010-2015, Senin (1/11) di Gedung DPRD Sidoarjo. Saiful yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa menggantikan Win Hendarso yang sudah dua kali menjabat Bupati Sidoarjo. Sebagai wakil bupati adalah Hadi Soetjipto, mantan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo.

"Saya minta Pak Saiful menggunakan 'kesaktiannya' untuk melakukan negosiasi dan supaya sasaran tercapai dalam penyelesaian relokasi jalan arteri. Setidaknya, Agustus 2011 pembuatan jalan arteri harus sudah selesai," ucap Soekarwo.

Soekarwo menambahkan, langkah yang dapat dilakukan untuk menuntaskan persoalan relokasi adalah dengan konsinyasi. Sebab, upaya pembebasan lahan jalan raya Porong sudah melebihi 75 persen seperti yang diisyaratkan dalam konsinyasi. Namun, tidak mudah menerapkan konsinyasi dan perlu kerja sama dengan banyak pihak.

Menjawab permintaan Soekarwo, Saiful mengatakan akan segera menuntaskan berbagai persoalan akibat dampak semburan lumpur Lapindo. Persoalan itu adalah pembayaran ganti rugi yang belum tuntas serta relokasi jalan tol dan arteri yang terancam semburan lumpur. Ia akan segera berkoordinasi dengan semua pihak pada hari kerja pertamanya sebagai bupati.

"Saya berupaya agar semua persoalan dampak semburan lumpur bisa diselesaikan secepat mungkin. Saya perlu berkoordinasi lagi dengan semua pihak untuk menuntaskan berbagai persoalan akibat semburan lumpur itu," ujar Saiful yang dikenal sebagai juragan tambak udang dan bandeng di Sidoarjo.

Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain mengatakan, tanah yang sudah dibebaskan untuk relokasi jalan arteri mencapai 84 persen. Jika ditambah jumlah yang sudah disepakati harganya tetapi belum dibayarkan, akan mencapai 89 persen. Jumlah itu melebihi syarat melakukan konsinyasi, yaitu 75 persen.

"Pembangunan jalan arteri memang terhambat karena beberapa warga enggan melepas tanah mereka. Dari BPLS, penyelesaian fisik bisa cepat diselesaikan asal tidak ada kendala pembebasan tanah," ujarnya.

Saat pelantikan berlangsung, terjadi unjuk rasa warga dari Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi. Unjuk rasa yang diikuti sekitar 25 orang berlangsung di Jalan Pahlawan atau sekitar 1 kilometer dari lokasi pelantikan. Tuntutan pengunjuk rasa itu adalah penyelesaian dampak semburan lumpur.

"Bupati dan wakilnya harus memerhatikan nasib korban lumpur. Mereka juga harus menuntaskan berbagai persoalan semburan gas dan tanah yang rawan ambles," kata Paijo, koordinator unjuk rasa. (APO)